



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN GUGATAN PERKARA TATA USAHA NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa gugatan perkara Tata Usaha Negara di bidang Kepegawaian dan bidang BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang ditujukan kepada Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan, dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara lainnya terus mengalami peningkatan secara kuantitas;
- b. bahwa gugatan perkara Tata Usaha Negara di bidang Kepegawaian berpengaruh terhadap wibawa pemerintah dan di bidang aset tanah dan/atau bangunan berpengaruh terhadap legalitas hak Pemerintah c.q. Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, sehingga untuk efektivitas penanganan perkara gugatan tersebut perlu dilakukan penanganan bersama;
- c. bahwa mekanisme penanganan bersama gugatan perkara Tata Usaha Negara oleh Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia belum diatur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Penanganan Gugatan Perkara Tata Usaha Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344); sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 320);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PENANGANAN GUGATAN PERKARA TATA USAHA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tata Usaha Negara selanjutnya disingkat TUN adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.
2. Badan atau Pejabat TUN adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
3. Keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
4. Sengketa TUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat TUN, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan TUN, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kepegawaian adalah segala hal-hal mengenai kedudukan, kewajiban, hak, dan pembinaan pegawai negeri.
6. Sengketa Kepegawaian adalah sengketa/perselisihan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan TUN di bidang kepegawaian oleh Badan atau Pejabat yang berwenang mengenai kedudukan, kewajiban, hak dan pembinaan Pegawai Negeri Sipil.
7. Aset tanah dan/atau bangunan adalah Barang Milik Negara yang dibeli atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan perolehan lain yang sah, dimiliki/dikuasai oleh Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
8. Pengadilan adalah Pengadilan TUN dan/atau Pengadilan Tinggi TUN di lingkungan Peradilan TUN.
9. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau

Pejabat TUN dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan.

10. Penggugat adalah pihak yang menggugat ke Pengadilan TUN.
11. Tergugat adalah Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.
12. Upaya hukum adalah hak Tergugat/Penggugat berupa Perlawanan atau Banding atau Kasasi atau hak untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali.
13. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
15. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
16. Mabes TNI adalah Markas Besar Tentara Nasional Indonesia.
17. Panglima Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Panglima TNI adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
18. Angkatan adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
19. Mabes Angkatan adalah Markas Besar Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
20. Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara.
21. Keputusan Tata Usaha Militer adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Militer yang berisi tindakan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penyelenggaraan pembinaan dan penggunaan militer serta pengelolaan pertahanan negara di bidang personel, materiil, fasilitas dan jasa yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata.
22. Sistem Informasi Manajemen dan Akutansi Barang Milik Negara di lingkungan Kemhan dan TNI, selanjutnya disebut SIMAK BMN Kemhan dan TNI adalah subsistem dari SAI Kemhan dan TNI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Peraturan Menteri ini mengatur tentang pedoman penanganan bersama Kemhan dan TNI terhadap gugatan perkara TUN bidang kepegawaian dan bidang BMN berupa tanah dan/atau bangunan di lingkungan Peradilan TUN.

BAB II KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Menteri berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat TUN dalam menerbitkan Keputusan TUN di bidang kepegawaian.
- (2) Panglima, Kepala Staf Angkatan, dan Pejabat di jajarannya berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Militer dalam menerbitkan administrasi di bidang kepegawaian.

Pasal 4

- (1) Menteri berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat TUN dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara di bidang BMN berupa tanah dan/atau bangunan.
- (2) Panglima, Kepala Staf Angkatan, dan Pejabat di jajarannya berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Militer dalam menerbitkan administrasi di bidang BMN berupa tanah dan/atau bangunan.

Bagian Kedua Tanggungjawab

Pasal 5

- (1) Menteri bertanggungjawab mengamankan secara hukum keputusan TUN di bidang kepegawaian yang diterbitkannya melalui penanganan gugatan di lingkungan Peradilan TUN.
- (2) Panglima, Kepala Staf Angkatan, dan Pejabat di jajarannya bertanggungjawab mengamankan secara hukum administrasi di bidang kepegawaian yang diterbitkannya melalui penanganan gugatan di lingkungan Peradilan TUN.

Pasal 6

- (1) Menteri bertanggungjawab mengamankan secara hukum keputusan TUN di bidang tanah dan/atau bangunan yang diterbitkannya melalui penanganan gugatan di lingkungan Peradilan TUN.
- (2) Panglima, Kepala Staf Angkatan, dan Pejabat di jajarannya bertanggungjawab mengamankan secara hukum administrasi di bidang BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang diterbitkannya melalui penanganan gugatan di lingkungan Peradilan TUN.

BAB III
MEKANISME PENANGANAN GUGATAN

Bagian Kesatu
Objek Gugatan

Pasal 7

Objek gugatan terdiri atas:

- a. keputusan dan administrasi di bidang kepegawaian; dan
- b. keputusan dan administrasi di bidang BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang terdiri atas:
 1. BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang dikuasai dan tercatat dalam SIMAK BMN Kemhan;
 2. BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang dikuasai dan tercatat dalam SIMAK BMN Mabes TNI; dan
 3. BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang dikuasai dan tercatat dalam SIMAK BMN Mabes Angkatan.

Bagian Kedua
Penggugat

Pasal 8

Penggugat terdiri atas:

- a. orang pribadi; dan
- b. Badan Hukum Perdata.

Bagian Ketiga

Tergugat

Pasal 9

Tergugat terdiri atas:

- a. Menteri;
- b. Panglima;
- c. Kepala Staf Angkatan;
- d. pejabat pada satuan kerja di bawah Panglima;
- e. pejabat pada satuan kerja di bawah Kepala Staf Angkatan; dan
- f. pejabat pada instansi di luar Kemhan, TNI, dan Angkatan.

Bagian Keempat
Bidang Kepegawaian

Pasal 10

- (1) Dalam hal Menteri selaku Tergugat atas objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Menteri membentuk Tim Kuasa Hukum dari unsur Kemhan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan untuk persidangan dan penyelesaian perkara.
- (2) Tim Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangani gugatan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. mengadakan koordinasi dengan Satuan Kerja/Sub Satuan Kerja di lingkungan Kemhan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan;
 - b. menyiapkan alat bukti:
 1. mengumpulkan bukti-bukti surat yang tersimpan di Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan;
 2. mencari dan menghadirkan saksi; dan
 3. dalam hal diperlukan mencari dan menghadirkan saksi ahli.
 - c. menyimpan salinan putusan:
 1. asli salinan putusan di Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan; dan
 2. fotokopi salinan putusan di Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Panglima selaku Tergugat atas objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Panglima membentuk Tim Kuasa Hukum dari unsur Kemhan dan Mabes TNI untuk persidangan dan penyelesaian perkara.
- (2) Tim Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangani gugatan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. mengadakan koordinasi dengan Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan dan Mabes TNI;
 - b. menyiapkan alat bukti:
 1. mengumpulkan bukti-bukti surat yang tersimpan di Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan dan Mabes TNI;
 2. mencari dan menghadirkan saksi; dan
 3. dalam hal diperlukan mencari dan menghadirkan saksi ahli.
 - c. menyimpan salinan putusan:
 1. asli salinan putusan di Asisten Personel Panglima TNI; dan
 2. fotokopi salinan putusan di:
 - a) Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan;
 - b) Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Kepala Staf Angkatan selaku Tergugat atas objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Kepala Staf Angkatan membentuk Tim Kuasa Hukum dari unsur Kemhan dan Mabes Angkatan untuk persidangan dan penyelesaian perkara.
- (2) Tim Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangani gugatan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. mengadakan koordinasi dengan Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan dan Mabes Angkatan dan instansi terkait;
 - b. menyiapkan alat bukti:
 1. mengumpulkan bukti-bukti surat yang tersimpan di Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan dan Mabes Angkatan;
 2. mencari dan menghadirkan saksi; dan
 3. dalam hal diperlukan mencari dan menghadirkan saksi ahli.
 - c. menyimpan salinan putusan:
 1. asli salinan putusan di Staf Personel Angkatan; dan

2. fotokopi salinan putusan di:

- a) Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan; dan
- b) Direktorat Hukum Angkatan Darat, Dinas Pembinaan Hukum Angkatan Laut, Dinas Hukum Angkatan Udara.

Pasal 13

Dalam hal Pejabat pada Satuan Kerja di bawah Panglima selaku Tergugat atas objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Panglima TNI bertindak selaku supervisi untuk persidangan dan penyelesaian perkara.

Pasal 14

Dalam hal Pejabat pada Satuan Kerja di bawah Kepala Staf Angkatan selaku Tergugat atas objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Kepala Staf Angkatan bertindak selaku supervisi untuk persidangan dan penyelesaian perkara.

Bagian Kelima

Bidang BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 15

- (1) Dalam hal Menteri selaku Tergugat atas objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 1 oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b, Menteri membentuk Tim Kuasa Hukum dari unsur Kemhan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan untuk persidangan dan penyelesaian perkara.
- (2) Tim Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangani gugatan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. mengadakan koordinasi dengan Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan, serta instansi terkait;
 - b. menyiapkan alat bukti:
 - 1. mengumpulkan bukti-bukti surat yang tersimpan di Satker/Sub Satker di lingkungan Kemhan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan;
 - 2. mencari dan menghadirkan saksi; dan
 - 3. dalam hal diperlukan mencari dan menghadirkan saksi ahli.
 - c. menyimpan salinan putusan:
 - 1. asli salinan putusan di Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemhan; dan
 - 2. fotokopi salinan putusan di Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Panglima selaku Tergugat atas objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 2 oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b, Panglima membentuk Tim Kuasa Hukum dari unsur Kemhan dan Mabes TNI untuk persidangan dan penyelesaian perkara.
- (2) Tim Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangani gugatan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. mengadakan koordinasi dengan Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan dan Mabes TNI serta Instansi terkait;
 - b. menyiapkan alat bukti:
 1. mengumpulkan bukti-bukti surat yang tersimpan di Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan dan Mabes TNI;
 2. mencari dan menghadirkan saksi; dan
 3. dalam hal diperlukan mencari dan menghadirkan saksi ahli.
 - c. menyimpan salinan putusan:
 1. asli salinan putusan di Satuan Fasilitas dan Konstruksi Denma Mabes TNI; dan
 2. fotokopi salinan putusan di Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia dan Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan.
- (3) Menteri dan Kepala Staf Angkatan mengajukan intervensi atas gugatan terhadap BMN berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Kepala Staf Angkatan selaku Tergugat atas objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 3 oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b, Kepala Staf Angkatan membentuk Tim Kuasa Hukum dari unsur Kemhan dan Mabes Angkatan untuk persidangan dan penyelesaian perkara.
- (2) Tim Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangani gugatan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. mengadakan koordinasi dengan Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan dan Mabes Angkatan serta Instansi terkait;
 - b. menyiapkan alat bukti:
 1. mengumpulkan bukti-bukti surat yang tersimpan di Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan dan Mabes Angkatan serta Instansi terkait;
 2. mencari dan menghadirkan saksi; dan
 3. dalam hal diperlukan mencari dan menghadirkan saksi ahli.

- c. menyimpan salinan putusan:
1. asli salinan putusan di Direktorat Zeni Angkatan Darat atau Dinas Fasilitas Pangkalan Angkatan Laut atau Dinas Fasilitas dan Konstruksi Angkatan Udara; dan
 2. fotokopi salinan putusan di Direktorat Hukum Angkatan Darat atau Dinas Pembinaan Hukum Angkatan Laut atau Dinas Hukum Angkatan Udara dan Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan.
- (3) Menteri dan Panglima dapat mengajukan intervensi atas gugatan terhadap BMN berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 3.

Pasal 18

Dalam hal Pejabat pada satuan kerja di bawah Panglima selaku Tergugat atas objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 2 oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b, maka Panglima membentuk Tim Kuasa Hukum dari unsur Kemhan dan Mabes TNI untuk persidangan dan penyelesaian perkara.

Pasal 19

Dalam hal Pejabat pada satuan kerja di bawah Kepala Staf Angkatan selaku Tergugat atas objek gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b angka 3 oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b, maka Kepala Staf Angkatan membentuk Tim Kuasa Hukum dari unsur Kemhan dan Mabes Angkatan untuk persidangan dan penyelesaian perkara.

Pasal 20

Dalam hal Pejabat pada instansi di luar Kemhan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan selaku Tergugat atas objek gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3, oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b, maka Menteri dan/atau Panglima dan/atau Kepala Staf Angkatan wajib melakukan intervensi dan membentuk Tim Kuasa Hukum dari unsur Kemhan dan/atau Mabes TNI dan/atau Mabes Angkatan untuk persidangan dan penyelesaian perkara

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat penanganan gugatan dibebankan pada Anggaran masing-masing Satuan Kerja Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Direktorat Hukum Angkatan Darat, Dinas Pembinaan Hukum Angkatan Laut, dan Dinas Hukum Angkatan Udara.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, penanganan gugatan tata usaha negara di bidang kepegawaian dan di bidang BMN berupa tanah dan/atau bangunan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2014

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR

Paraf:

- 1. Karo TU
:
- 2. Takah Dissip Kabag
:
- 3. Paraf : bag
- 4. Kasum TNI : bag

Paraf:

- 1. um Karok
:
- 2. Ba Paraf:
- 3. 1. Renhan Kemhan Dirjen
Ya: :
- 4. 2. Kuathan Kemhan Dirjen
Ha : :
- 5. 3. Pothan Kemhan Dirjen
Lu : :
- 4. Dirjen